

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana diketahui pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Darise ; 2007)

Kota Surakarta yang merupakan daerah otonom secara geografis wilayahnya pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, batas bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo Karanganyar, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten

Sukoharjo dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan data dari BPS kota Surakarta, pendapatan daerah tahun 2010 sampai dengan 2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat sampai tahun 2012. Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2012. Laju inflasi kota Surakarta dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami penurunan namun kembali naik pada tahun 2012. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2012.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom. Karena yang mengerti persoalan daerahnya adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. (Darise ; 2007)

Dalam era otonomi daerah saat ini, salah satu aspek yang harus diperhatikan dengan seksama adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran. Anggaran daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai itu, anggaran daerah harus diorientasikan

pada kepentingan masyarakat yang menuntut transparansi informasi anggaran kepada publik dan termuat dalam laporan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah, di dalamnya meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran juga dapat menggambarkan rencana strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai otonomi daerah yang mensyaratkan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola keuangan secara sendiri. (Yuwono ; 2005)

Sasaran yang dimuat dalam APBD harus sesuai dengan fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan, dan perkiraan biaya kegiatan yang bersangkutan. APBD harus memuat bagian pendapatan yang digunakan untuk membiayai biaya administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/investasi. Apabila sasaran tersebut dimuat APBD tersebut akan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pembiayaan

adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisish antara pendapatan daerah dan belanja daerah. (Utomo ; 2005)

Sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Pendapan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Darise ; 2007)

Anggaran yang baik harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin agar tujuan dan sasarannya tercapai secara berdaya dan berhasil guna. Pelaksanaan anggaran belanja daerah, pengurusan administrasi, dan kebendaharaan harus benar – benar tertib. Pengurusan administrasi adalah wewenang untuk mengadakan tindakan – tindakan dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawa akibat pengeluaran yang menjadi beban anggaran daerah. Pengurus kebendaharaan merupakan wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar, atau mengeluarkan uang dan barang, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. (Yuwono ; 2005)

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah di kota Surakarta. Alasan penulis memilih penelitian ini karena kota Surakarta dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam pencarian data. Data yang ada di BPS Surakarta cukup lengkap sehingga sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di kota Surakarta.
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah di kota Surakarta.
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Daerah di kota Surakarta.
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Daerah di kota Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi terhadap Pendapatan Daerah di kota Surakarta tahun 1992 sampai dengan tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah kota Surakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi terhadap pendapatan daerah di kota Surakarta.
2. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, hasil penelitian ini dapat memberi inspirasi mengenai bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi terhadap pendapatan daerah di kota Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Analisis

Dalam penelitian ini akan dipergunakan alat analisis *Error Corection Model* (ECM). Model koreksi kesalahan mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisis banyak fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Model koreksi kesalahan mengansumsikan keberadaan suatu hubungan equilibrium jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi. Dalam jangka pendek tentu saja yang terjadi adalah disequilibrium.

Model jangka panjang :

$$\text{Log PD}^*_t = \beta_0 + \beta_1 \text{ logPAD}_t + \beta_2 \text{ logDP}_t + \beta_3 \text{ logPDRB}_t + \beta_4 \text{ logINF}_t + U_t$$

dimana:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien jangka panjang

Model jangka pendek standar :

$$\Delta \log(\text{PD})_t = \alpha_1 \Delta \log(\text{PAD})_t + \alpha_2 \Delta \log(\text{DP})_t + \alpha_3 \Delta \log(\text{PDRB})_t + \alpha_4$$

$$\Delta \log(\text{INF})_t - \lambda (\log \text{PAD}_{t-1} - \log \text{DP}_{t-1} - \log \text{PDRB}_{t-1} - \log \text{INF}_{t-1}) + U_t$$

Estimasi Jangka Pendek :

$$\Delta \log(\text{PD})_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \log(\text{PAD})_t + \gamma_2 \Delta \log(\text{DP})_t + \gamma_3 \Delta \log(\text{PDRB})_t + \gamma_4 \Delta \log(\text{INF})_t + \gamma_5 \log \text{PAD}_{t-1} + \gamma_6 \log \text{DP}_{t-1} + \gamma_7 \log \text{PDRB}_{t-1} + \gamma_8 \log \text{INF}_{t-1} + \gamma_9 \text{ECT} + U_t$$

Di mana:

$$\gamma_0 = \lambda \cdot \beta_0$$

$$\gamma_1 = \alpha_1 \quad \gamma_2 = \alpha_2 \quad \gamma_3 = \alpha_3 \quad \gamma_4 = \alpha_4$$

$$\gamma_5 = -\lambda(1 - \beta_1)$$

$$\gamma_6 = -\lambda(1 - \beta_2)$$

$$\gamma_7 = -\lambda(1 - \beta_3)$$

$$\gamma_8 = -\lambda(1 - \beta_4)$$

$\gamma_9 = \lambda$; koefisien penyesuaian

$$\text{ECT} = \log \text{PAD}_{t-1} + \log \text{DP}_{t-1} + \log \text{PDRB}_{t-1} + \log \text{INF}_{t-1} - \log \text{PD}_{t-1}$$

Keterangan :

PD_t : pendapatan daerah

PAD_t : pendapatan asli daerah

DP_t : dana perimbangan

INF_t : inflasi

PDRB_t : produk domestik regional bruto

ECT : *Error Corection Term*

t : periode waktu

Untuk menguji persamaan regresi dari di atas maka digunakan beberapa pengujian sebagai berikut :

Uji Asumsi Klasik

Untuk memperkuat signifikansi dari koefisien yang diperoleh bahwa tidak ada penyimpangan terhadap asumsi klasik, maka dilakukan uji ekonometrika sebagai berikut:

a. Multikolinearitas

Masalah multikolinesritas muncul jika terdapat hubungan yang pasti di antara satu atau lebih variabel indpenden dalam model. Dalam kasus terdapat multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. Bila tujuan dari penelitian adalah mengukur arah besarnya variabel independen secara akurat, masalah multikolinearitas penting untuk diperhitungkan.

b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi tidak konstan atau berubah – ubah secara sistemik seiring dengan berubahnya nilai variabel independen. Pada pengujian ini dapat dilakukan uji *white*.

c. Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel di masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa yang akan datang. Dengan demikian masalah autokorelasi merupakan masalah khusus dari data *time series*.

d. Uji Normalitas

Uji Normalitas atau error penting untuk dilakukan, sebab uji eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel independen (uji t) dan estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal ini, apabila asumsi tidak terpenuhi baik uji F maupun t dan estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid.

e. Uji Spesifikasi Model

Pada uji spesifikasi model ini akan digunakan uji *Ramsey Reset* yang dikenal dengan uji kesalahan spesifikasi umum atau *general test of specification error*.

Uji Statistik

a. Uji Validitas Pengaruh

Untuk menguji variabel pengaruh dari variabel independen terhadap dependen digunakan uji t yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen secara dua sisi.

b. Uji F

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah model penduga yang telah dibentuk merupakan model yang tepat sebagai estimator dari fungsi Pendapatan Daerah.

c. Interpretasi koefisien determinasi majemuk (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kebaikan model yaitu menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dengan rentang waktu 20 tahun yaitu tahun 1992 – 2012. Data yang diperoleh bersumber dari buku – buku literatur, jurnal penelitian dan dari Biro Pusat Statistik (BPS) kota Surakarta.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari laporan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori – teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang deskripsi objek dari penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran penelitian.